Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan manusia menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan Sunnah memperlihatkan perhatian utama pada kesejahteraan keseluruhan umat manusia dan para peneliti Islam menarik kesimpulan bahwa tujuan dari *Syariah* (*Maqashid Syariah*) adalah untuk kesejahteraan umat manusia dan menjauhkannya dari kesulitan.[1] Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah (2): 201,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya : "Dan di antara mereka ada yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka".

Berdasarkan ayat tersebut secara umum menjelaskan bahwa manusia sejatinya selalu menginginkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Hal ini sudah menjadi fitrah dari manusia itu sendiri. Allah Swt yang Maha Mengetahui atas makhluk-Nya dan segala kebutuhan dan keinginannya. Segala apa yang ada di langit dan di bumi diperuntukkan demi kemaslahatan umat manusia.

[1] MB Hendrie Anto, "*Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries"*, (*Paper on Islamic Finance and Economics International Conference*, Langkawi, 2009), h. 75.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan manusia terletak pada perlindungan terhadap kebutuhan agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*aqli*), keturunan (*nasb*), dan harta (*māl*). Dalam konsep Islam, kesejahteraan manusia tidak hanya melalui pemenuhan aspek material tetapi lebih menekankan pada aspek non-material atau spiritual. Kesejahteraan hidup di dunia hanyalah sementara dan akhirat bersifat kekal. Kesejahteraan ini disebut dengan *falāh.* Hal inilah yang menjadi tujuan pembangunan dalam Islam.[2]

Menurut Chapra, pemenuhan kebutuhan spiritual menghendaki pembangunan moral, sedangkan pemuasan kebutuhan materi menghendaki pembangunan manusia dan sumber daya materi dalam pola yang merata sehingga semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan tercipta suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil.[3]

Hal yang menjadi fokus utama bagi upaya pembangunan dan jantung dalam proses pembangunan adalah manusia. Proses pembangunan apapun harus dimulai dari pembangunan moral, spiritual, fisik, dan pembangunan lingkungan manusia yang akan menjadi agen bagi lingkungan fisik dan sosial-ekonominya. Demikian pula dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan mengandung arti tidak hanya sebagai proses produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, transformasi kelembagaan dan struktural,

[2] *Ibid*, h. 25.
[3] M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 7-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

atau pencapaian keseimbangan ekologis. Semua itu hanya alat yang diperlukan dalam pembangunan manusia.[4]

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang sangat vital dalam pembangunan. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Manusia selain sebagai pelaku pembangunan juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam hal ini maka diperlukan sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan.

Untuk melihat sejauh mana pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Semakin tinggi IPM maka semakin tinggi pula kesejahteraan penduduknya. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini

[4] Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta:Erlangga, 2010), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.[5]

1. Kelompok "sangat tinggi" : ≥ 80
2. Kelompok "tinggi" : 70 ≤ IPM < 80
3. Kelompok "sedang" : 60 ≤ IPM < 70
4. Kelompok "rendah" : IPM < 60

Dalam laporan IPM UNDP berdasarkan peringkat dunia untuk capaian IPM pada tahun 2015 Indonesia menempati urutan ke-113 dan masuk dalam kategori negara dengan IPM sedang (*Medium Human Development*) yaitu sebesar 0,689. Dibandingkan dengan negara ASEAN Indonesia berada di peringkat ke-4 mengungguli Vietnam, Philiphina, Timor Leste, Kamboja, dan Myanmar. IPM tertinggi dicapai oleh Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Thailand.[6]

Hal ini merupakan suatu kemajuan yang masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Level IPM Indonesia sudah cukup baik, akan tetapi jika dilihat pada capaian IPM dari setiap provinsi masih terdapat jurang yang cukup jauh. Ada provinsi yang memiliki IPM tergolong tinggi dan ada pula provinsi dengan IPM yang tergolong rendah. Berikut data Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Indonesia pada periode tahun 2010-2016 dengan metode baru.

---

[5] Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Provinsi Riau*, No. 30/06/14/Th. XVII, 15 Juni 2016, h. 7.

[6] UNDP, *Human Development Report* 2016: *Human Development for Everyone*, (New York, 2016), h. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel I.1
Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi Tahun 2010-2016
(Metode Baru)

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia							Rata -rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ACEH	67.09	67.45	67.81	68.3	68.81	69.45	70	68.42
SUMATERA UTARA	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70	68.42
SUMATERA BARAT	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73	68.91
RIAU	68.65	68.9	69.15	69.91	70.33	70.84	71.20	69.85
JAMBI	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89	69.62	67.57
SUMATERA SELATAN	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46	68.24	66.28
BENGKULU	65.35	65.96	66.61	67.5	68.06	68.59	69.33	67.34
LAMPUNG	63.71	64.2	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65	65.65
KEP. BANGKA BELITUNG	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05	69.55	67.80
KEP. RIAU	71.13	71.61	72.36	73.02	73.4	73.75	73.99	72.75
DKI JAKARTA	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99	79.60	77.98
JAWA BARAT	66.15	66.67	67.32	68.25	68.8	69.5	70.05	68.11
JAWA TENGAH	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98	68.03
DI YOGYAKARTA	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38	76.67
JAWA TIMUR	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95	69.74	67.51
BANTEN	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96	69.32
BALI	70.01	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27	73.65	72.01
NUSA TENGGARA BARAT	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19	65.81	63.62
NUSA TENGGARA TIMUR	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67	63.13	61.43
KALIMANTAN BARAT	61.97	62.35	63.41	64.3	64.89	65.59	65.88	64.06
KALIMANTAN TENGAH	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77	68.53	69.13	67.41
KALIMANTAN SELATAN	65.20	65.89	66.68	67.17	67.63	68.38	69.05	67.14
KALIMANTAN TIMUR	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59	73.11
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	67.99	68.64	68.76	69.20	68.65
SULAWESI UTARA	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39	71.05	69.44
SULAWESI TENGAH	63.29	64.27	65	65.79	66.43	66.76	67.47	65.57
SULAWESI SELATAN	66	66.65	67.26	67.92	68.49	69.15	69.76	67.89
SULAWESI TENGGARA	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07	68.75	69.31	67.61
GORONTALO	62.65	63.48	64.16	64.7	65.17	65.86	66.29	64.62
SULAWESI BARAT	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24	62.96	63.60	61.67
MALUKU	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74	67.05	67.60	65.99
MALUKU UTARA	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91	66.63	64.63
PAPUA BARAT	59.60	59.9	60.3	60.91	61.28	61.73	62.21	60.85
PAPUA	54.54	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05	56.19
INDONESIA	**66.53**	**67.09**	**67.7**	**68.31**	**68.9**	**69.55**	**70.18**	**68.32**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017[7]

Berdasarkan pada data tabel I.1. dapat dilihat Indeks pembangunan Indonesia dalam kurun 7 tahun mengalami peningkatan meskipun masih berada pada kategori sedang (60 ≤ IPM < 70). Hal ini menunjukkan tren

[7]Badan Pusat Statistik, "Tabel Dinamis Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Metode Baru" https://www.bps.go.id/site/resultTab, Diakses pada tanggal 12 Februari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

positif terhadap peningkatan kualitas manusia Indonesia dari tahun ke tahun. Namun secara umum dapat dikatakan pencapaian IPM mengalami stagnasi yaitu dalam kurun 7 tahun masih berada pada kategori sedang. Serta masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup jauh antara provinsi dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah.

Sementara itu, jika dibandingkan tingkat IPM antar provinsi di setiap pulau, IPM tertinggi adalah di Pulau Jawa dan berturut-turut Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan terendah adalah Pulau Maluku dan Papua.

Pulau Sumatera merupakan satu diantara pulau di Indonesia dengan jumlah provinsi terbanyak yaitu terdiri atas 10 provinsi. Dibandingkan dengan provinsi di pulau lain di Indonesia, IPM provinsi-provinsi di Sumatera tergolong pada kategori sedang.

Tabel I.2
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Sumatera Tahun 2010-2016

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)							Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Aceh	67,09	67,45	67,81	68,3	68,81	69,45	70	68,42
Sumatera Utara	67,09	67,34	67,74	68,36	68,87	69,51	70	68,42
Sumatera Barat	67,25	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98	70,73	68,91
Riau	68,65	68,9	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	69,85
Jambi	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24	68,89	69,62	67,57
Sumatera Selatan	64,44	65,12	65,79	66,16	66,75	67,46	68,24	66,28
Bengkulu	65,35	65,96	66,61	67,5	68,06	68,59	69,33	67,34
Lampung	63,71	64,2	64,87	65,73	66,42	66,95	67,65	65,65
Kep. Bangka Belitung	66,02	66,59	67,21	67,92	68,27	69,05	69,55	67,80
Kep. Riau	71,13	71,61	72,36	73,02	73,4	73,75	73,99	72,75
Sumatera	**66,61**	**67,11**	**67,69**	**68,36**	**68,85**	**69,45**	**70,03**	**68,30**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan tabel I.2. IPM tertinggi berada pada Provinsi Kepulauan Riau sementara IPM terendah adalah Provinsi Lampung. Secara umum IPM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pulau Sumatera mengalami peningkatan hal ini didukung oleh peningkatan IPM pada masing-masing provinsi.

IPM berdasarkan atas tiga indikator yakni pengukuran terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (tingkat ekonomi). Dalam hal ini melalui pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya pembangunan manusia yang terwujud melalui realisasi APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah).

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan SDM. Melalui peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan keterampilan dan pada akhirnya diharapkan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan terciptalah masyarakat yang sejahtera.

Faktor kesehatan juga tidak dapat pula diabaikan karena hal ini terkait langsung terhadap pembangunan fisik manusia itu sendiri bahkan menjadi faktor penting. Hal ini merupakan tugas pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun peranan pemerintah berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas SDM melalui investasi modal manusia berupa alokasi APBD pada bidang pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dan akses akan pendidikan dan kesehatan sangat tergantung pada kondisi perekonomian masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu kualitas SDM juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan pada suatu wilayah/negara. Hal

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ini terkait dengan indikator IPM lainnya yaitu standar hidup layak masyarakat.

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.[8]

Tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar-sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan.[9]

Tidak meratanya distribusi pendapatan menyebabkan hanya sebagian penduduk dapat menikmati akses kesehatan dan pendidikan yang layak. Sementara sebagian besar penduduk lainnya tidak mendapatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Hal ini akan menurunkan kualitas manusia (IPM).

Todaro dan Smith dalam bukunya Ekonomi Pembangunan mengemukakan bahwa terdapat dua ukuran pokok dalam distribusi pendapatan. *Pertama*, ukuran distribusi pendapatan yaitu besar atau kecilnya

[8] Devianti Patta, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010", (Skripsi Fakultas Ekonomi Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012), h. 8.

[9] Michael P Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan,* (Jakarta:Erlangga, 2003), h. 60-61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang (biasanya menggunakan metode kurva Lorentz dan *gini* rasio). *Kedua*, distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi.

Maka untuk menilai kemerataan distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah/negara sangat timpang, sedang, atau rendah salah satunya adalah dengan menggunakan *gini* rasio. Berikut data BPS mengenai *gini* rasio Provinsi se-Sumatera dari Tahun 2010-2016.

Tabel I.3
Gini rasio Provinsi di Sumatera Tahun 2010-2016

Provinsi	Gini Rasio							Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Aceh	0,3	0,33	0,32	0,34	0,32	0,33	0,33	0,32
Sumatera Utara	0,35	0,35	0,33	0,35	0,32	0,34	0,32	0,34
Sumatera Barat	0,32	0,35	0,36	0,36	0,33	0,34	0,33	0,34
Riau	0,33	0,36	0,40	0,37	0,35	0,36	0,33	0,36
Jambi	0,3	0,34	0,34	0,35	0,33	0,36	0,35	0,34
Sumatera Selatan	0,34	0,34	0,40	0,38	0,40	0,36	0,35	0,37
Bengkulu	0,36	0,36	0,35	0,39	0,36	0,38	0,36	0,37
Lampung	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,38	0,36	0,36
Kep. Bangka Belitung	0,3	0,30	0,29	0,31	0,30	0,28	0,27	0,29
Kep. Riau	0,29	0,32	0,35	0,36	0,40	0,36	0,35	0,35
SUMATERA	**0,33**	**0,34**	**0,35**	**0,36**	**0,36**	**0,35**	**0,34**	**0,35**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan mengalami fluktuasi dan rata-rata untuk Sumatera gini rasio berada pada kategori sedang. Hal ini berbeda dengan tingkat IPM pulau Sumatera pada periode yang sama (tabel I.2) justru mengalami peningkatan. Sementara adanya kenaikan *gini* rasio berarti telah terjadi peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan, hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang pada akhirnya dapat menurunkan indeks pembangunan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul, **"Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Provinsi di Sumatera)"**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang maka penulis membuat batasan permasalahan yang akan diteliti pada pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus provinsi di Sumatera).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia?
2. Bagaimana pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

a. Memberi wawasan tambahan terhadap penulis mengenai pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia serta tinjauannya menurut ekonomi Islam.

b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lain yang terkait.

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2017. Penelitian mengambil provinsi-provinsi di Sumatera sebagai obyek studi dan sekaligus sebagai lokasi penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Jenis data yang digunakan adalah eksternal data. Eksternal data adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

data yang diperoleh dari sumber luar, seperti badan atau lembaga.[10] Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data indeks pembangunan manusia dan gini rasio Provinsi di Sumatera. Sampel pada penelitian ini adalah data indeks pembangunan manusia dan gini rasio Provinsi di Sumatera pada Tahun 2010-2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui metode penulusuran *online* yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penulusuran dilakukan pada sumber-sumber data online yang dapat dipercaya (*credible*) dan telah dikenal oleh banyak kalangan. Data berupa hasil publikasi, dokumen, maupun laporan yang diperoleh dari hasil penelusuran pada website Badan Pusat Statistik, serta lembaga lain yang terkait.

5. Model Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Sumatera. Penelitian terdiri atas satu variabel independen (X) yaitu ketimpangan distribusi pendapatan dan satu variabel dependen (Y) yaitu indeks pembangunan manusia. Untuk mencari hubungan X dengan Y, menggunakan teknik korelasi sederhana. Model kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

[10] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 145.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar I.1

Model Kerangka Berpikir

6. Hipotesis Penelitian

Untuk menganalisa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Ketimpangan distribusi pendapatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

H_a : Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel I.4

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator
Ketimpangan Distribusi Pendapatan (X)	Ketimpangan distribusi pendapatan adalah perbedaan proporsi pendapatan antar kelompok masyarakat	1. Kurva Lorenz 2. Gini Rasio 3. Ukuran Bank Dunia
Indeks Pembangunan Manusia (Y)	Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).	1. Indeks kesehatan 2. Indeks Pendidikan 3. Standar Hidup Layak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Teknik Analisis Data

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan beberapa uji statistik sebagai berikut.

a. Uji Koefisien Korelasi Sederhana

Analisa ini digunakan untuk melihat keeratan hubungan antar variabel. Koefisien korelasi bergerak antara 0,00 sampai 1,00 (disebut korelasi positif) atau antara 0,00 sampai - 1,00 (disebut korelasi negatif). Korelasi positif berarti kenaikan variabel pertama diikuti dengan kenaikan skor variabel kedua. Sedangkan korelasi negatif adalah korelasi dimana kenaikan skor variabel pertama diikuti dengan menurunnya skor variabel kedua, atau sebaliknya.

Kriteria derajat hubungan koefisien adalah hubungan sangat lemah (0,00 – 0,20), hubungan lemah (0,21 – 0,40), hubungan sedang (0,41 – 0,60), hubungan kuat (0,61 – 0,80), hubungan sangat kuat (0,81 – 1,00). Berikut rumus koefisien korelasi.

$$R = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 ini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai R^2 kemudian dikali 100% sehingga akan diketahui seberapa besar kontribusi X terhadap Y. Semakin besar nilai R^2 (mendekati = 1), maka pengaruh variabel X besar/kuat terhadap variabel Y. Sebaliknya,

semakin kecil nilai R^2 (mendekati = 0), maka pengaruh variabel X terhadap Y semakin kecil atau lemah.

c. Uji t (t-*test*)

Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan t-hitung dengan t-tabel, apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu pula sebaliknya.

Uji Statistik di atas akan diolah dengan menggunakan pengolah data statistik IBM SPSS (*Statistics for Product and Service Solution*) versi 23.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mencakup latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Sumatera.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penelitian, analisis data pengujian hipotesis, dan tinjauan ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini**.**

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.